

**ANALISIS KEURGANSIAN PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN
TANAH LAUT**

SKRIPSI



Oleh :

**PREDI SUGANDA
NPM. 19810648**

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB
BANJARMASIN
2023**

ABSTRAK

Predi Suganda. NPM. 19.81.0648. 2023. *Analisis Keurgensian Pembentukan Produk Hukum Daerah Tentang Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanah Laut.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H., Pembimbing II Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Analisis, Produk Hukum Daerah, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kabupaten Tanah Laut.*

Berangkat dari maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi pada musim kering di Indonesia, salah satunya ialah berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Setiap tahunnya Kabupaten Tanah Laut selalu mengalami kebakaran hutan dan lahan, tidak hanya lahan kering tetapi lahan gambut pun mengalami hal yang sama sehingga perlu ditanggulangi secara efektif. Maka untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memerlukan Produk Hukum Daerah mengenai perlindungan hutan dan lahan untuk mengendalikan masyarakat agar tidak sembarangan melakukan pembakaran lahan.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam menetapkan kebijakan tentang pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta bagaimana bentuk materi muatan yang harus diatur dalam Produk Hukum Daerah tentang kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis yang digunakan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa dengan adanya rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan gagasan yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka perkembangan ekosistem, social, ekonomi, dan politik Kabupaten Tanah Laut. Karena secara filosofis, pembentukan rancangan Produk Hukum Daerah ini bertujuan demi mencapai tujuan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum sehingga aturan ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum. (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jln. Majapahit No.62 Mataram: Mataram University Press.

Jurnal

Alfian Mardiansyah, “Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2016, hlm. 156, dapat diakses online pada <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/112/pdf>, tanggal 01 Mei 2023.

Anang Shophan Tornado, dkk., “Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Delik Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Selatan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, hlm. 10, dapat diakses online pada https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0ibWr04v_AhXb-DgGHX37DHEQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fsnnlb.ulm.ac.id%2Fprosiding%2Findex.php%2Fsnnlb-lit%2Farticle%2Fdownload%2F314%2F314&usg=AOvVaw3TPWgLPafdqmmKkV9RiZVI, tanggal 01 Mei 2023.

Dwi Putri Cahyawati,dkk, ” Pembagian Kewenangan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)”, *Al-QISTH LAW REVIEW*, Vol.5 No.2 tahun 2022, hlm. 345, dapat diakses online pada <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/download/12196/6973>., tanggal 06 Mei 2023.

Fachmi Rasyid, “Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan”, *Jurnal Lingkar Widya Swara Edisi.1 No.4 Oktober-Desember 2014*, hlm.5, dapat diakses online pada https://juliwi.com/published/E0104/Paper0104_47-59.pdf, tanggal 06 Mei 2023.

Herman Daryono, “Potensi, Permasalahan Dan Kebijakan Yang Diperlukan Dalam Pengelolaan Hutan Dan Lahan Rawa Gambut Secara Lestari”, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol.6 No.2 , Agustus 2009, hlm.81. Dapat diakses online pada:<http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/336>, tanggal Mei 2023.

I Nengah Suantra, S.H., M.H. & Made Nurmawati, S.H., M.H., ” Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *Naskah Tutorial, Fakultas Hukum Denpasar 2016*, hlm. 4, dapat diakses

onlinepadahttps://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/82772d18fda11e83fed7290646195f01.pdf., tanggal 06 Mei 2023.

Jeni Fitria, “Sanksi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Ilmu Syari’ah, 2017, hlm. 24, dapat di akses online pada <http://repository.radenintan.ac.id/2847/1/skripsi.pdf>., tanggal 04 Mei 2023.

Marhaeni Ria Siombo, “UU No.23 Tahun 2014 dan Perubahan Kewenangan Pemda dan Dampaknya Pada Pengelolaa SDA”, Bina Hukum Lingkungan, Vol.2 No.1 , Oktober 2017, hlm.43. Dapat diakses online pada: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBt6PN2p2AAxVyxzgGHX-0A1kQFnoECBQQAQ&url=http%3A%2F%2Fbhl-jurnal.or.id%2Findex.php%2Fbhl%2Farticle%2Fdownload%2Fbhl.v2n1.4%2Fpdf&usg=AOvVaw034YwXkp_j8m9YRpe8ok2K&opi=89978449, tanggal Mei 2023.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, dapat diakses online pada https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, pada tanggal 01 Mei 2023.

Kamus/Ensiklopedia

Dendy Sugono.dkk, (2008), Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta:Pusat Bahasa, hlm. 178, dapat diakses online pada : <https://oldi.lipi.go.id/public/Kamus%20Indonesia.pdf>., tanggal 06 Mei 2023.

Website

Direktoral Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, “Daftar Istilah Kehutanan”, dapat diakses online pada <https://ditjenppi.menlhk.go.id/21-reddplus.html?l=eni&man=mo98&start=35>, tanggal 01 Mei 2023.

_____, “Kontribusi Penurunan Emisi GRK Nasional, Menuju NDC 2030”, dapat diakses online pada <https://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/3150-kontribusi-penurunan-emisi-grk-nasional,-menuju-ndc-2030.html>, pada tanggal 01 Mei 2023.

Jurnal Bumi, “Kebakaran Hutan” dapat diakses online pada <https://jurnalbumi.com/knol/kebakaran-hutan/>., tanggal 01 Mei 2023.

SiPongi Karhutla Monitoring System, “Data Rekapitulasi Kebakaran Hutan dan Lahan Per Provinsi Di Indonesia, Direktorat PKHL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI”, dapat diakses online pada <https://www.sipongi.menlhk.go.id>, tanggal 01 Mei 2023.

Wikipedia, “Geografi Kabupaten Tanah Laut”, dapat diakses online pada https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanah_Laut, tanggal 01 Mei 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan, dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.22 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan ditetapkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang diubah kembali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diubah menjadi PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 22 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan ditetapkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim.

Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dicabut dengan Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Permentan No. 5 Tahun 2018 Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Kalimantan Selatan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut No. 5 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 79 Tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 – 2023.